



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Merpati No. 12 SLAWI - 52419
Telp. (0283) 491302 Fax. (0283) 491302

Slawi, 02 September 2021

Nomor : 005/11/1688
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Undangan pertemuan Advokasi Revitalisasi
Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS)**

Kepada Yth. :
(Daftar Penerima Terlampir)
di -
S L A W I

Menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Jawa Tengah, tanggal 30 Agustus 2021 , Nomor : 4368 / KB. 06.01 / J.3 / 2021 ,perihal undangan pertemuan Advokasi Revitalisasi Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) serta dalam rangka meningkatkan akses Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, BKKBN dan UNFPA akan mengadakan Virtual Meeting untuk wilayah Regional V (jawa Tengah).

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan undangan kegiatan virtual meeting dimaksud yang akan di selenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 08 September 2021
Pukul : 08:00 s.d. Selesai
Tempat : Link Zoom : Meeting ID 813 6647 7884 Passcode pkbrs2021
Acara : Pertemuan Advokasi Revitalisasi Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS)

Keterangan : Peserta Kabupaten Kota Terdiri dari :

- Kepala OPD KB Kab/ Kota
- Kepala Dinas Kesehatan Kab / Kota
- Direktur RS Pemerintah yang memberikan Pelayanan KB
- Direktur RS Swasta yang memberikan pelayanan KB

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ELLIYA HIDAYAH, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196901081990032006



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.

Daftar Penerima Surat OPD Pemkab Tegal

- 1 dr Hendadi Setiaji, M.Kes (Kepala Dinas Kesehatan)
- 2 dr Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.SP.An. (Direktur RSUD dr. Soeselo, RSUD dr. Soeselo Slawi)
- 3 Esti Nurwikti, S.IP, MM (Kasubag Umum dan Kepegawaian, Dinas P3AP2 dan KB)



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.

Daftar Penerima Surat Non OPD Pemkab Tegal

1 Direktur RS Hawari Essa



Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)**, dan dapat diperiksa validitas-nya menggunakan aplikasi android **VeryDS**.

JADWAL KEGIATAN

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
08.00 — 08.20 WIB	Persiapan Video Conference	Panitia
08.20 — 08.30 WIB	Penjelasan Tata Tertib	Panitia
08.30 — 09.15 WIB	Pembukaan: <ul style="list-style-type: none"> - Laporan penyelenggaraan - Sambutan UNFPA <i>representative</i> - Arahan Kepala BKKBN 	MC
09.15 — 10.15 WIB	Paparan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan Kontrasepsi dan Kesehatan Reproduksi 2. Kebijakan dan Strategi BKKBN dalam Revitalisasi Pelayanan KB di RS 3. Peningkatan Pelayanan KB PP dan <i>Clinical Pathway</i> Pelayanan KB di RS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kesehatan Keluarga, Kemenkes 2. Deputi Bidang KBKR, BKKBN 3. Ketua Umum PB POGI <p>Moderator : Direktur Bina Akses Pelayanan KB</p>
10.15 — 10.45 WIB	Pembahas : <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes 2. Ketua Umum PERSI 	
10.45 — 11.30 WIB	Diskusi	Seluruh Peserta
11.30 — 12.00 WIB	Kesimpulan dan Penutup	Direktur Bina Akses Pelayanan KB

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERTEMUAN ADVOKASI REVITALISASI PELAYANAN KB DI RUMAH SAKIT
(PKBRS)
TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

Undang — Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk sebagai modal dasar pembangunan merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, undang undang tersebut juga mengamanatkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah perlu melaksanakan program yang berkaitan dengan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. BKKBN berkewajiban mendukung tercapainya Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertera dalam RPJMN 2020-2024 dengan ukuran keberhasilan berupa sasaran strategis 2020-2024 yang harus dicapai diantaranya adalah a) Menurunnya Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,24 pada tahun 2021; b) Meningkatnya Angka Prevalensi. Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) menjadi 62,16 persen pada tahun 2021; c) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need menjadi 8,3 persen pada tahun 2021; d) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 24 per-1.000 kelahiran pada tahun 2021.

Rumah Sakit memiliki peran yang penting dalam pelayanan keluarga berencana. Pada era 1980-1990-an, pelayanan KB di rumah sakit (PKBRS) terbilang cukup sukses. Pada era tahun tersebut PKBRS diselenggarakan di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah, yaitu dengan membentuk Unit Pelaksana Fungsional (UPF) yang dipimpin oleh penanggung jawab PKBRS di bagian Kebidanan. PKBRS juga mempunyai andil yang besar terhadap penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, serta penurunan stunting. Rumah Sakit juga sebagai rujukan bagi ibu hamil yang memiliki risiko terhadap kehamilan berikutnya sehingga perlu menggunakan kontrasepsi melalui KB pascapersalinan di Rumah Sakit.

Namun, beberapa tahun terakhir cakupan pelayanan KB di rumah sakit belum sesuai harapan. Sejak dimulainya pelaksanaan JKN tahun 2014, pelayanan KB di Rumah Sakit mengalami kendala seperti adanya regulasi terkait pembiayaan di Rumah Sakit, rujukan berjenjang dan harus berdasarkan indikasi medis.

Oleh karena itu, dengan kerja sama dan dukungan mitra kerja, seperti organisasi profesi, perhimpunan dan asosiasi RS, dilakukan Pertemuan Advokasi Revitalisasi Pelayanan KB di Rumah Sakit Tahun 2021. Pertemuan ini akan dilaksanakan secara virtual, untuk seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum :

Meningkatkan akses pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang berkualitas

2. Tujuan Khusus :
 - a. Meningkatkan peran dan komitmen Rumah Sakit dalam pelayanan KB
 - b. Meningkatkan cakupan pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)
 - c. Meningkatkan pelayanan KB Pasca Persalinan (PP) dan Pasca Keguguran (PK)
 - d. Menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD)
 - e. Mendukung upaya penurunan stunting
 - f. Meningkatkan Kualitas pelayanan KB di Rumah Sakit
 - g. Meningkatkan komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah serta mitra kerja dalam meningkatkan pelayanan KB di Rumah Sakit

C. HASIL YANG DIHARAPKAN :

1. Terlaksananya Advokasi penguatan pelayanan KB di rumah sakit kepada seluruh stakeholder dan mitra kerja terkait
2. Adanya komitmen rumah sakit dan provider untuk meningkatkan pelayanan KB Pasca Persalinan dan Pelayanan KB di rumah sakit.

D. MATERI, NARASUMBER DAN PEMBAHAS

Materi Narasumber Pertemuan Advokasi Penguatan Pelayanan KB di Rumah Sakit Tahun 2021 ini terdiri dari :

1. Arahan, oleh Kepala BKKBN
2. Sambutan dari UNFPA Representative Indonesia
3. Kebijakan Pelayanan Kontrasepsi dan Kesehatan Reproduksi
oleh : Direktur Kesehatan Keluarga, Kemenkes
4. Kebijakan dan Strategi BKKBN dalam Revitalisasi Pelayanan KB di Rumah Sakit
oleh : Deputi Bidang KBKR, BKKBN
5. Peningkatan Pelayanan KB PP dan *Clinical Pathway* Pelayanan KB di RS
oleh : Ketua Umum PB POGI

PEMBAHAS :

1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes
2. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)

E. PESERTA

Peserta Pertemuan Advokasi Penguatan Pelayanan KB di Rumah Sakit Tahun 2021 ini terdiri dari :

1. BKKBN Pusat :
 - a. Kepala BKKBN
 - b. Deputi Bidang KBKR
 - c. Direktur Bina Akses Pelayanan KB
 - d. Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB
 - e. Direktur Bina Kesehatan Reproduksi
 - f. Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus
 - g. Direktur Pelaporan dan Statistik
 - h. Direktur Komunikasi, Informasi dan Edukasi
 - i. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga
 - j. Direktur Teknologi, Informasi dan Data
 - k. Biro Hukum, Organisasi dan Tata Laksana
 - l. Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN

- m. Biro Umum dan Humas
- n. Pusat Penelitian dan Pengembangan KB dan KS

2. Stakeholder Pusat :

- a. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes
- b. Direktur Kesehatan Keluarga Kemenkes
- c. Direktur Mutu dan Akreditasi Kemenkes
- d. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes

3. Mitra Kerja Pusat :

- a. Ketua PB POGI
- b. Ketua Pokja KB dan Kespro, POGI
- c. Ketua PP Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
- d. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
- e. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA)
- d. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Seluruh Indonesia (ARSSI)
- e. Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Vertikal Indonesia (ARVI)
- f. UNFPA Representative Indonesia
- g. DR. Dr. Herbert Situmorang Sp.OG(K)

4. Provinsi

- a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi/ Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan KB Provinsi
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
- d. Ketua PC POGI
- e. Ketua Cabang PERSI

5. Kabupaten/Kota :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten/Kota
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- c. Direktur Rumah Sakit Pemerintah yang memberikan pelayanan KB (1 rumah sakit)
- d. Direktur Rumah Sakit Swasta yang memberikan pelayanan KB (1 rumah sakit)

F. JADWAL KEGIATAN

Pertemuan Advokasi Penguatan Pelayanan KB di Rumah Sakit Tahun 2021 dilaksanakan dalam 5 (lima) regional, dengan jadwal kegiatan sebagai berikut :

WAKTU	KEGIATAN	NARASUMBER
08.00 — 08.20 WIB	Persiapan Video Conference	Panitia
08.20 — 08.30 WIB	Penjelasan Tata Tertib	Panitia
08.30 — 09.15 WIB	Pembukaan: - Laporan penyelenggaraan - Sambutan UNFPA <i>representative</i> Arahan Kepala BKKBN	MC

09.15 — 10.15 WIB	<p>Paparan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Pelayanan Kontrasepsi dan Kesehatan Reproduksi 2. Kebijakan dan Strategi BKKBN dalam Revitalisasi Pelayanan KB di RS 3. Peningkatan Pelayanan KB PP dan <i>Clinical Pathway</i> Pelayanan KB di RS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Kesehatan Keluarga, Kemenkes 2. Deputi Bidang KBKR, BKKBN 3. Ketua Umum PB POGI <p>Moderator : Direktur Bina Akses Pelayanan KB</p>
10.15 — 10.45 WIB	<p>Pembahas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes 2. Ketua Umum PERSI 	
10.45 — 11.30 WIB	Diskusi	Seluruh Peserta
11.30 — 12.00 WIB	Kesimpulan dan Penutup	Direktur Bina Akses Pelayanan KB

Waktu Pelaksanaan :

No	Waktu Pelaksanaan	Peserta
1	<p>Regional 1 1 September 2021</p> <p>Zoom ID meeting ' 870 1565 7972 Passcode: pkbrs2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKKBN Pusat 2. <i>Stakeholder</i> Pusat 3. Mitra Pusat 4. Provinsi dan Kab/Kota : <ol style="list-style-type: none"> a. Provinsi Sulsel dan 24 Kab/Kota di Provinsi Sulsel b. Provinsi Sulut dan 15 Kab/Kota di Provinsi Sulut c. Provinsi Maluku dan 11 Kab/Kota di Provinsi Maluku d. Provinsi Malut dan 10 Kab/Kota di Provinsi Malut e. Provinsi Papua dan 29 Kab/Kota di Provinsi Papua f. Provinsi Papbar dan 13 Kab/Kota di Provinsi Papbar
2	<p>Regional 2 2 September 2021</p> <p>Zoom ID meeting : 875 6401 9206 Passcode: pkbrs2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKKBN Pusat 2. <i>Stakeholder</i> Pusat 3. Mitra Pusat 4. Provinsi dan Kab/Kota : <ol style="list-style-type: none"> a. Provinsi Kalbar dan 14 Kab/Kota di Provinsi Kalbar b. Provinsi Kalteng dan 14 Kab/Kota di Provinsi Kalteng

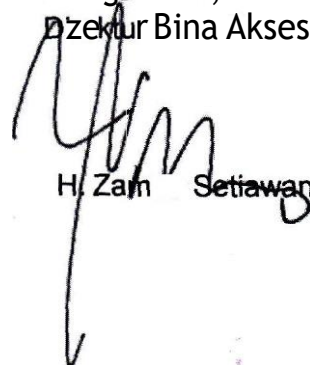
		<ul style="list-style-type: none"> c. Provinsi Kaltim dan Kaltara dan 15 Kab/Kota di Provinsi Kaltim/Kaltara d. Provinsi Kalsel dan 13 Kab/Kota di Provinsi Kalsel e. Provinsi NTT dan 22 Kab/Kota di Provinsi NTT f. Provinsi NTB dan 10 Kab/Kota di Provinsi NTB g. Provinsi Sulteng dan 13 Kab/Kota di Provinsi Sulteng
3	<p>Regional 3 6 September 2021</p> <p>Zoom ID meeting : 835 2053 4742 Passcode: pkbrs2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. BKKBN Pusat 2. <i>Stakeholder</i> Pusat 3. Mitra Pusat 4. Provinsi dan Kab/Kota : <ul style="list-style-type: none"> a. Provinsi Sulbar dan 6 Kab/Kota di -Provinsi Sulbar b. Provinsi Gorontalo dan 6 Kab/Kota di Provinsi Gorontalo c. Provinsi Sultra dan 17 Kab/Kota di Provinsi Sultra d. Provinsi Bali dan 9 Kab/Kota di Provinsi Bali e. Provinsi Jatim dan 38 Kab/Kota di Provinsi Jatim f. Provinsi Jabar dan 27 Kab/Kota di Provinsi Jabar
4	<p>Regional 4 7 September 2021</p> <p>Zoom ID meeting : 896 9081 9941 Passcode: pkbrs2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. BKKBN Pusat 2. <i>Stakeholder</i> Pusat 3. Mitra Pusat 4. Provinsi dan Kab/Kota <ul style="list-style-type: none"> a. Provinsi Aceh dan 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh b. Provinsi Sumbar dan 19 Kab/Kota di Provinsi Sumbar c. Provinsi Riau dan 12 Kab/Kota di Provinsi Riau d. Provinsi Bengkulu dan 10 Kab/Kota di Provinsi Bengkulu e. Provinsi Sumsel dan 17 Kab/Kota di Provinsi Sumsel f. Provinsi Lampung dan 15 Kab/Kota di Provinsi Lampung g. Provinsi Banten dan 8 Kab/Kota di Provinsi Banten

.5	Regional 5 "8 September 2021 Zoom ID meeting : 813 6647 7884 Paslcode: pkbrs2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. BKKBN Pusat 2. <i>Stakeholder</i> dan mitra Pusat 3. Provinsi dan Kab/Kota : <ol style="list-style-type: none"> a. Provinsi Sumut dan 33 Kab/Kota di Provinsi Sumut b. Provinsi Kepri dan 7 Kab/Kota di Provinsi Kepri c. Provinsi Jambi dan 11 Kab/Kota di Provinsi Jambi d. Provinsi Babel dan 7 Kab/Kota di Provinsi Babel Provinsi e. DKI Jakarta dan 6 Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta f. Provinsi Jateng dan 35 Kab/Kota di Provinsi Jateng g. Provinsi DI Yogyakarta dan 5 - Kab/Kota di Provinsi DI Yogyakarta
----	---	---

G. PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan ini bersumber pada AWP UNFPA tahun 2021

Mengetahui,
 Direktur Bina Akses Pelayanan KB,



H. Zam Setiawan